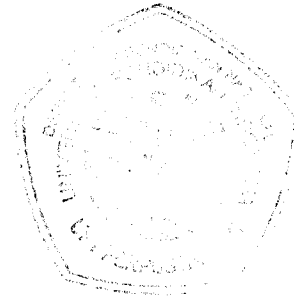


BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Masalah dan sekaligus tantangan besar yang sedang dihadapi dunia pendidikan kita saat ini adalah berupa tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional, yang dapat memberikan pelayanan proses pendidikan dan hasil akhir pendidikan yang efektif dan efisien, sehingga pendidikan benar-benar mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

Masyarakat di masa yang lalu beranggapan bahwa penyelenggaraan pendidikan ini seolah-olah hanyalah tanggung jawab pemerintah saja. Akibatnya pendidikan diklaim terpisah dari kebutuhan masyarakat, dari dunia industri dan dunia kerja, intelektualisme yang sempit telah memisahkan dunia pendidikan dari kehidupan yang sebenarnya. Kondisi ini menyebabkan pendidikan dianggap tidak dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, padahal pendidikan ini diyakini sebagai investasi pembangunan bangsa yang akan meningkatkan "Human Capital" sebagai aset pembangunan tersebut.

Indikator kelemahan tersebut terlihat dari : pertama, sisi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dari output pendidikan yang masih tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Kedua, yang lebih menyedihkan lagi adalah ketidak mampuan sistem pendidikan nasional untuk memelihara dan menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur karakter bangsa

Indonesia yang religius. Hal ini ditandai dengan semakin lunturnya perilaku mulia (akhlaqul karimah) di kalangan pelajar, bahkan bergeser menjadi perilaku-perilaku yang menjurus pada kejahatan berupa tawuran antar pelajar, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), dan perilaku seks bebas di kalangan pelajar, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah penelitian :

Penelitian Dr. Winarini Wildan Mansoer, pada tahun 1997 tawuran melibatkan 137 sekolah (10% SLTP), terdapat 247 titik rawan di jalanan dan 11 titik rawan di terminal, dengan korkan jiwa yang semakin meningkat. Selama tiga minggu pertama tahun ajaran 1999/2000 saja sudah 5 pelajar tewas dalam tawuran...dalam laporan Kakanwil Depdiknas DKI Jaya kepada Mendiknas Yahya Muhaimin beberapa waktu lalu menyebutkan, sebanyak 1.015 siswa di 166 SMU di Jakarta selama tahun 1999/2000 terlibat tindak pidana narkoba...data Menko Kesra juga menyebutkan, terjadi kenaikan angka tertular penyakit menular seksual di kalangan remaja putri tingkat SLTP dan SMU di hampir semua kota besar di Indonesia. (SAKSI, No.18. 12 Juni 2001)

Fenomena tersebut harus segera disikapi secara benar dan sungguh-sungguh sebab jika hal ini terus berlangsung maka kekhawatiran para pakar tentang hilangnya sebuah generasi mungkin akan menjadi sebuah kenyataan. Terlebih lagi bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada pola persaingan global yang telah direncanakan, seperti pasar bebas ASEAN dengan kesepakatan AFTA mulai tahun 2003 dan sistem pasar terbuka antar negara anggota APEC pada tahun 2020. Oleh karena itu tampaklah betapa reposisi pendidikan nasional dalam kehidupan masyarakat menjadi begitu penting dan merupakan tanggung jawab bersama yang mendesak untuk dilaksanakan.

Seiring dengan semangat reformasi, maka desentralisasi pendidikan nasional dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 membawa harapan adanya perbaikan kualitas pendidikan nasional. "*Desentralisasi pendidikan akan*

memberikan efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, pemerataan.” (H.A.R. Tilaar, 2000:87).

Dalam desentralisasi sistem pendidikan nasional setidaknya ada tiga sasaran yang hendak dicapai, yaitu : (1) menjadikan pendidikan lebih relevan dengan tuntutan dan kebutuhan global, sehingga adanya link and match pendidikan dengan stake holder pendidikan, (2) mengembalikan peran serta masyarakat dalam pendidikan berupa tanggung jawab masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendidikan, (3) mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut hidup dan berkembang, di kembangkan di dalam lingkungan keluarga masyarakat yang berbudaya.

Semakin besar partisipasi masyarakat di dalam pendidikannya, semakin tinggi pula akuntabilitas pendidikan, termasuk di dalam relevansi pendidikan terhadap kebutuhan nyata dalam masyarakat, Mastuhu (1994:4) menyatakan :

Suatu lembaga pendidikan akan berhasil menyelenggarakan kegiatannya jika ia dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam kehidupan masyarakat yang melingkarinya. Keberhasilan itu menunjukkan adanya kecocokan nilai antara lembaga pendidikan yang bersangkutan dan masyarakatnya, setidaknya tidak bertentangan. Lebih dari itu, suatu lembaga pendidikan akan diminati oleh anak-anak, orang tua dan seluruh masyarakat apabila ia mampu memenuhi kebutuhan mereka akan kemampuan ilmu dan teknologi untuk menguasai suatu bidang kehidupana tertentu dan kemampuan moral keagamaan dan moral sosial budaya untuk menempatkan diri mereka di tengah-tengah pergaulan bersama manusia terhormat.

Dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia, kita mengenal salah satu subsistem pendidikan nasional yang telah menyatu dan mengakar dalam kehidupan masyarakat serta tumbuh seiring tuntutan dinamika perubahan di

dalamnya, yaitu pendidikan pesantren. Pondok pesantren keberadaannya telah dikenal sejak lima abad yang silam dalam budaya pendidikan kita, sebagaimana dinyatakan oleh Qomari Anwar (1998 : 106) : *“Pondok pesantren sebenarnya sudah ada sejak abad ke – 15. Hal ini bisa kita buktikan dari sejarah adanya Pondok Pesantren Gelogak Arum yang didirikan oleh Raden Fatah (Raja Demak) tepatnya pada tahun 1476”*.

Kontribusi pendidikan pesantren bagi pembangunan bangsa tampak nyata. Sejak jaman perjuangan kemerdekaan, banyak tokoh pergerakan kemerdekaan terlahir dari latar pendidikan pesantren demikian pula pasca Indonesia merdeka sampai saat ini. Oleh karena itu keberadaan pendidikan pesantren telah dirasakan dan diakui sebagai aset pendidikan yang harus pula mendapat perhatian.

Saat ini pendidikan pesantren tengah berjuang dalam memantapkan identitas dan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan bangsa yang sedang membangun ini, sebagai subsistem pendidikan nasional. Makin mantap dan kukuh kedudukannya serta semakin besar peran dan sumbangannya dalam memenuhi kebutuhan nasional melalui upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, akan semakin jelas identitasnya dan oleh karenanya akan semakin dinamis gerak perjuangannya. Hal yang demikian ini akan tercapai jika pesantren mampu mempertahankan identitasnya di satu pihak dan terbuka bagi kemajuan ilmu dan teknologi di pihak yang lain, dalam rangka mencapai cita-cita nasional.

Pendidikan pesantren adalah sistem pendidikan yang berlandaskan pada tata nilai ajaran Islam, dimana konsep Islam mempunyai berbagai keistimewaan,

Kamal Muhammad Isa (Qomari Anwar (1998 : 87) menguraikan keistimewaan tersebut antara lain :

1. **Konsep Islam merupakan konsep Ilahi yang ditransformasikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ia akan "kekal" dan tak akan berubah-ubah secara substansial. Sesuai dengan perkembangan zaman, ia akan mampu memenuhi semua kebutuhan manusia yang utuh. Ia akan membimbing akal dan mengarahkan kemampuan manusia pada titik tujuan yang amat jelas.**
2. **Konsep Islam meletakkan manusia sebagai ciptaan Allah yang terdiri atas jasmani yang terkait ke bumi dan memiliki keinginan nafsu, serta rohani yang terkait ke langit. Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan jasad dan ruh. Konsep ini memberikan keseimbangan yang konkrit antara kepentingan jasmaniah dan rohaniah, kepentingan individu dan juga bersama.**
3. **Konsep Islam ciptaan Allah karenanya ia bersifat mutlak, kokoh, mantap, realistik dan "aplicable", tidak bersifat khayali atau nisbi.**

Sehingga dalam konsep pendidikan Islam pendidikan itu sarat akan nilai Ketuhanan, yang berarti : (1) Secara prinsip tujuan dan sasaran pendidikan sangat jelas. (2) Setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh para pendidik mutlak harus diorientasikan pada upaya mewujudkan kesempurnaan umat manusia. (3) Pendidikan perlu dirancang dan disajikan secara gradasi, bermula dari yang rendah hingga yang tinggi, dan (4) Peran pendidikan hendaknya tidak menyimpang dari realisasi ketaatannya kepada Allah Swt. (Abdurahman An Nahlawi , 1998).

Keterbukaan pesantren terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan pesantren dari pola tradisional menuju pola yang lebih modern baik yang menyangkut sumber belajar maupun yang menyangkut pengelolaan pendidikan.

Selain itu juga semakin hari pesantren semakin dalam memasuki budaya masyarakat industri. Sifat-sifat dari masyarakat industri antara lain adalah tata

hubungan semakin rasional, dinamis dan kompetitif. Produk yang dihasilkan bersifat massive dan standart, tetapi juga terspesialisasi. Di bidang pendidikan, lulusan dari lembaga pendidikan yang sejenis dan setingkat memiliki corak kualitas yang sama. Kerja kependidikan akan semakin didominasi oleh kegiatan pengembangan sains dan teknologi.

Beberapa indikator pergeseran yang dialami oleh pesantren antara lain terlihat pada hal-hal berikut : (1) Kyai bukan lagi merupakan satu-satunya sumber belajar. Dengan semakin beraneka ragam sumber-sumber belajar baru, dan semakin tingginya dinamika komunikasi antara sistem pendidikan pesantren dan sistem yang lain, maka santri dapat belajar dari banyak sumber. (2) Dewasa ini hampir seluruh pesantren menyelenggarakan jenis pendidikan formal, yaitu madrasah, sekolah umum dan perguruan tinggi. (3) Seiring dengan pergeseran-pergeseran tersebut, santri membutuhkan izasah dan penguasaan bidang keahlian, atau keterampilan yang jelas, yang dapat mengantarkannya untuk menguasai lapangan kehidupan tertentu, sehingga (4) Dikalangan santri terdapat kecenderungan yang semakin kuat untuk mempelajari sains dan teknologi pada lembaga-lembaga pendidikan formal untuk memperoleh keahlian atau keterampilan tersebut, tetapi mereka juga tetap ingin belajar di pesantren untuk mendalami agama dalam rangka memperoleh moral agama. (5) Belajar di pesantren tidak lagi tanpa biaya pendidikan, melainkan sudah sama sebagai mana umumnya sekolah di luar pesantren yang dikenai kewajiban membayar sejumlah uang pendidikan.

Keterbukaan ini akan memaksa pesantren untuk mencari bentuk baru yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi tetap dalam kandungan iman dan takwa kepada Allah Swt. sehingga pendidikan pesantren mengalami perubahan yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan jaman.

Pondok pesantren dewasa ini telah berkembang dan merupakan lembaga gabungan antara sistem pondok dan pesantren, yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem non-klasikal. Sedang santrinya dapat bermukim di pondok yang disediakan atau merupakan santri yang tidak mukim di pondok. Pondok pesantren ini pun pada gilirannya menyelenggarakan sistem pendidikan klasikal (schooling) baik yang bersifat pendidikan umum maupun agama yang lazim disebut madrasah. (Saridjo, 1985:10)

Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan pesantren adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren yang dapat memberikan layanan proses pendidikan yang efektif sehingga dapat melahirkan para lulusan pendidikan pesantren yang berkualitas, yaitu : *'manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, serta anggun dalam moral dan kebijakan'* (A. Syafei Ma'arif, 1991:146) sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dinamika perubahan global.

Untuk tercapainya pendidikan pesantren yang berkualitas tersebut diperlukan dukungan secara optimal dari berbagai sumber daya Internal dan eksternal organisasi yang dibutuhkannya, Dana merupakan salah satu sumber terpenting dalam hal ini, karena *"setiap kegiatan pendidikan memerlukan biaya"* (Moch. Idochi Anwar, 1990:50), *"semua rekayasa dalam membangun bidang pendidikan baik secara makro, meso ataupun mikro mempunyai kaitan langsung dengan konsep biaya pendidikan"* (Moch. Idochi Anwar, 1990:1), dan

“pendidikan yang bermutu membutuhkan biaya besar” (Tilaar, 1991:52). Maka “dapatlah dikatakan bahwa mutu pendidikan merupakan fungsi dari biaya. Makin kaya sekolah makin baik mutunya karena bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada murid-muridnya melalui penyediaan guru yang lebih bermutu-dan fasilitas belajar- mengajar yang yang lebih baik”. (Dedi Supriadi, 1991:52)

Penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VIII, Pasal 36, yang menyatakan bahwa :

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah.**
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan.**
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.**

Selama ini dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah sangatlah terbatas jumlahnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana APBN bidang pendidikan, menjadi kendala besar dalam suksesnya penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas, termasuk pendidikan pesantren di dalamnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Zubaidi (2001) dari sekian permasalahan yang ada dalam pendidikan Islam diantaranya adalah masalah kekurangan dana dan minimnya pasilitas pendidikan.

Oleh karena itu masalah biaya pendidikan hendaknya tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah, maka dalam hal ini perlu adanya optimalisasi

pembiayaan pendidikan yang bersumber pada lingkungan pendidikan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat di dalamnya.

Pemberdayaan mengandung makna sebagai upaya untuk membangun diri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. (Ginjar Kartasmita, 1997). Pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari dua faktor dasar yang mempengaruhinya, yaitu : (1) faktor internal (lembaga pendidikan pesantren), dan (2) faktor eksternal (lingkungan Masyarakat).

Dengan demikian secara internal pesantren berupaya untuk menanamkan keyakinan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan gambaran masa depan yang dijanjikan oleh pendidikan pesantren, sehingga akan bangkit kepercayaan masyarakat untuk ikut berperan serta didalamnya. Lembaga pesantren juga harus membangun kredibilitas pesantren sebagai lembaga yang terpercaya dalam pengelolaan dan penggunaan dana masyarakat, serta menampilkan budaya organisasi yang dapat diandalkan dan dibanggakan sebagai aset umat Islam, bukan menjual label Islam di tengah kelemahan pengelolaan pesantren.

Secara eksternal berhubungan dengan kinerja personal daripada organisasi kemasyarakatan sehingga dihasilkan kerja yang optimal sesuai dengan harapan, baik harapan lembaga pendidikan pesantren ataupun harapan masyarakat.

Pemberdayaan juga menuntut adanya perlakuan manajemen terhadap kedua faktor tersebut berupa: "*enabling, facilitating, consulting, collaborating, mentoring, supporting*" (Aileen Mitchell Stewart, 1994:77).

Peran serta masyarakat dalam pendidikan, menurut PP No. 39 tahun 1992

pasal 4 dapat berbentuk :

1. **Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau luar sekolah, semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan dan semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah.**
2. **Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan.**
3. **Pengadaan dan pengadaan tenaga ahli.**
4. **Pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah.**
5. **Pengadaan dana dan pemberiaan bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa dan sejenisnya.**
6. **Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung dan tanah untuk pelaksanaan KBM.**
7. **Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan.**
8. **Pemberian kesempatan untuk magang dan atau latihan kerja.**
9. **Pemberian bantuan manajemen.**
10. **Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan.**
11. **Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian serta pengembangannya.**
12. **Keikutsertaan dalam program pendidikan dan atau penelitian.**

Dengan melihat ketentuan perundang-undangan tersebut, sangatlah luas dan terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat atau dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan khususnya pendidikan pesantren, baik dalam aspek pemikiran yang terkait dengan kebijakan pesantren atau peran serta dalam hal fisik atau material.

Dalam hal pembiayaan, pendidikan pesantren lebih mengandalkan pada kemandirian lembaga dalam pembiayaan pendidikannya, dana diperoleh dari berbagai sumber yang ada berupa sumbangan para santri dan orang tua, wakaf, zakat, infak dan shodakoh.

Secara kuantitas sebenarnya potensi dukungan dana masyarakat bagi pendidikan pesantren sangatlah besar, dengan populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 210 juta, 85 % adalah umat Islam, yang berarti 178,5 juta orang. Dalam keyataannya potensi ini belum tergali dengan baik sehingga kurang memberikan dampak bagi pendidikan pesantren, maka kini sudah saatnya pondok pesantren lebih bisa memanfaatkan potensi ini secara lebih baik, perolehan dana pendidikan melalui zakat, infak dan shodakoh perlu ditingkatkan, dirumuskan strategi yang lebih cerdas melalui berbagai kegiatan pendidikan dan usaha pesantren yang memungkinkan untuk dilaksanakan, seperti: (1) pendirian Koperasi Pesantren (Kopontren) yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sekitar pesantren, (2) menyelenggarakan unit-unit usaha, (3) pendidikan dan pelatihan mental dan keagamaan, (4) memperluas jaringan kerjasama dan silaturahmi dengan berbagai kalangan masyarakat; usahawan, ilmuwan, birokrat dan lain-lain.

Untuk dapat memberdayakan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pesantren dengan berbagai kegiatan seperti diuraikan di atas, pesantren perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, diantaranya manajemen strategik. *“Manajemen strategik dapat berfungsi sebagai sarana mengkomunikasikan tujuan organisasi dan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemilih, eksekutif, karyawan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan”*. (Suwarsono, 1996:17). Sehingga seorang pemimpin akan dapat merumuskan strategi atau metode pemberdayaan yang tepat melalui pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi bukan hanya untuk saat ini lebih jauh lagi untuk masa yang akan datang.

Keyataannya sebagian besar lembaga pendidikan pesantren saat ini masih menerapkan pola-pola pemberdayaan masyarakat yang sangat sederhana, akibatnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sangat minim.

Apabila masalah tersebut dibiarkan maka timbul kekhawatiran :

(1) pesantren tidak dapat mengelola dana masyarakat secara optimal, (2) masyarakat tidak lagi peduli untuk ikut berperan serta dalam pembiayaan pendidikan pesantren, (3) dana penyelenggaraan pendidikan pesantren sangat bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga semakin memberatkan alokasi dana pemerintah untuk bidang pendidikan, (4) tujuan peningkatan kualitas pendidikan pesantren tidak dapat tercapai, (5) tujuan pendidikan nasional menjadi sulit dicapai.

Ditengah kekhawatiran tersebut, Pesantren Daarut Tauhiid (DT) Bandung ternyata diakui telah berhasil melakukan satu pola pemberdayaan masyarakat untuk ikut aktif berperan serta dalam pembiayaan pendidikan pesantren. Sehingga pesantren ini dapat mengembangkan pola pendidikan kepesantrenannya secara memasyarakat dengan kualitas yang baik. Secara kuantitatif peran serta masyarakat ini terlihat dari kontribusi masyarakat dalam pengumpulan dana produktif pesantren selama tahun 2000, rata-rata terkumpul dana kurang lebih seratus juta rupiah per bulan. Bagaimanakah manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh pesantren DT ?. Hal tersebut merupakan fenomena menarik dan sangat penting untuk dikaji lebih lanjut melalui penelitian.

Bertolak dari uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian berjudul: **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan Pesantren. (Kajian Pada Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung Tahun 2001).**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah nampak bahwa peningkatan kualitas pendidikan pesantren tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa dukungan dana yang mencukupi.

Berbagai sumber dana potensial bagi pembiayaan pendidikan pesantren dimiliki atau ada pada masyarakat sekitarnya dan selama ini peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pesantren tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu pola manajemen pemberdayaan masyarakat.

Lembaga pendidikan pesantren akan dapat dengan efektif memberdayakan masyarakat, apabila kekuatan internal pesantren dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi lingkungan masyarakat sekitar. Keterbukaan manajemen organisasi, budaya kerja yang produktif serta religius merupakan ciri dasar pengelolaan pendidikan pesantren yang harus dikembangkan dan dikomunikasikan secara baik.

Peluang dan Ancaman eksternal dapat menjadi faktor pendukung pendidikan pesantren apabila keduanya dianggap sebagai tantangan untuk maju, sebaliknya akan menjadi faktor penghambat apabila disikapi sebagai masalah.

Perubahan organisasi yang direncanakan membutuhkan perhatian yang eksklusif terhadap masalah-masalah sosial. Dorongan perubahan dalam organisasi dipengaruhi oleh : (1) Perubahan internal; sistem lingkungan, sasaran dan nilai, struktural, psikososial dan manajerial. (2) Perubahan eksternal; teknologi, ekonomi, hukum, politik dan kependudukan.

Untuk mencapai keseimbangan dinamis antara tuntutan perubahan masyarakat dengan organisasi perlu kesadaran untuk mempelajari bagaimana menyusun, menyesuaikan diri, dan mengubah organisasi dengan cara yang lebih sesuai dengan aspirasi manusia, bagaimana mengorganisir usaha manusia secara efektif kedalam struktur khusus yang kompleks dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, sementara tetap mempertahankan integritas sistem merupakan perhatian utama organisasi.

Tugas utama seorang manajer adalah menjalin kecocokan strategis antara organisasi dengan lingkungannya, adapun prosesnya menyangkut :

- a. Pencocokan kompetensi organisasi dengan tuntutan lingkungan.
- b. Mengatur struktur dan proses internal sedemikian rupa sehingga dapat tampil dengan alternatif yang berarti.
- c. Mengembangkan kompetensi baru untuk memenuhi tuntutan masa depan.

Maka pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pesantren pada akhirnya menuntut seorang manajer untuk melakukan intervensi terhadap masyarakat untuk : membuat mampu (enabling), memperlancar (facilitating), berkonsultasi (consulting), bekerja sama (collaborating), membimbing (mentoring), dan mendukung (supporting). Melalui norma pemberdayaan berupa : mengembangkan visi bersama, mendidik, menyingkirkan rintangan-rintangan, mengungkapkan, menyemangati, memperlengkapi, menilai, dan mengharapkan. (Aileen Mitchell Stewart, 1994).

Bertolak dari uraian latar belakang, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : "Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pesantren DT".

Untuk lebih jelasnya fokus masalah tersebut, dirinci menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Pola pendidikan apakah yang dikembangkan ?
 - a. apa visi, misi dan tujuan pendidikan pesantren DT ?
 - b. bentuk pendidikan apakah yang dikembangkan ?
2. Konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat yang manakah yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan DT ?
 - a. apa yang menjadi dasar dan tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan ?
 - b. faktor-faktor internal apa saja yang berpengaruh bagi pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan ?
 - c. faktor-faktor eksternal apa saja yang berpengaruh bagi pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan ?
3. Langkah-langkah strategis pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan apakah yang dilaksanakan ?
 - a. bagaimana aspek perencanaannya ?
 - b. bagaimana aspek pelaksanaannya?
 - c. bagaimana aspek pertanggungjawabannya ?
4. Hasil apakah yang diperoleh dari strategi yang digunakan bagi pembiayaan pendidikan dan kegiatan pesantren DT ?
 - a. sebesar apakah porsi dana keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pesantren ?
 - b. kegiatan pendidikan pesantren apa saja yang dapat dilaksanakan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena yang menjadi pokok permasalahan. Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh informasi objektif bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pesantren DT.

Sesuai dengan tujuan umum tersebut di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis hal-hal sebagai berikut :

1. Pola pendidikan yang dikembangkan oleh pesantren DT.
2. Konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan DT.
3. Langkah-langkah strategis pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan DT itu dilaksanakan.
4. Hasil yang diperoleh dari strategi yang digunakan bagi pembiayaan pendidikan dan kegiatan pesantren DT.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian ini, yaitu memperdalam kajian administrasi pendidikan khususnya pembiayaan pendidikan baik sebagai penguatan konsep teori biaya pendidikan maupun praktek dalam administrasi pendidikan. Secara praktis penelitian ini diharapkan :

- a. Memberikan bahan sumbangan pemikiran dan pengkajian lebih lanjut bagi yang berminat tentang peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pesantren.

- b. Sebagai bahan kajian dan masukan kepada pihak pengambil keputusan pada pesantren DT berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pesantren.

D. Premis Penelitian

Sebagai dasar pijakan yang kokoh atas permasalahan penelitian ini, maka perlu adanya anggapan dasar (asumsi) penelitian. Adapun asumsi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan merupakan kebutuhan asasi manusia, yang akan memberikan dampak bagi kehidupan secara pribadi maupun kemasyarakatan di masa akan datang berupa keuntungan ekonomi (profit) yang akan meningkatkan pendapatan dan nilai manfaat (benefit) yang akan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian pendidikan merupakan investasi SDM (human capital) yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. (Komaruddin, 1991; Nanang Fattah, 2000)
2. Agar proses pendidikan dapat berjalan baik guna tercapainya tujuan yang telah digariskan, maka perlu didukung oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses pendidikan tersebut, antara lain: sarana dan prasarana, tenaga dan biaya yang cukup menentukan, karena setiap kegiatan pendidikan akan memerlukan biaya dan juga semua rekayasa dalam membangun bidang pendidikan baik makro, meso ataupun mikro mempunyai kaitan langsung dengan konsep biaya pendidikan. (Moch. Idochi Anwar, 1990)
3. Pendidikan yang bermutu membutuhkan biaya besar, dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa mutu pendidikan merupakan fungsi biaya. Makin kaya sekolah makin baik mutunya karena bisa memberikan pelayanan yang



lebih baik kepada murid-muridnya melalui penyediaan guru yang lebih bermutu dan fasilitas belajar-mengajar yang lebih baik. (Tilaar, 1991; Dedi Supriadi, 1991)

4. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sistem desentralisasi pendidikan berimplikasi pada peningkatan peran serta masyarakat yang lebih tinggi termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam pendidikan, yang berarti juga adanya tuntutan kemandirian lembaga dalam pengelolaan pendidikan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan kemandirian tersebut maka usaha-usaha yang dilaksanakan adalah usaha-usaha pemberdayaan (empowerment). (Djam'an Satori, 1999; Tilaar, 2000)
5. Pesantren adalah suatu sistem kehidupan dan pendidikan yang lahir dan dibesarkan dalam suatu masyarakat yang tengah mengalami perubahan ke arah modernisasi. Meskipun di dalam perkembangannya pengelolaan pesantren banyak ditentukan oleh para kyai sebagai pemiliknya, namun tidak dapat disangkal bahwa kehidupan pesantren telah ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya, pesantren merupakan model *archaic* dari pendidikan berbasis masyarakat. (Mastuhu, 1994; Tilaar, 2000)

E. Paradigma Penelitian

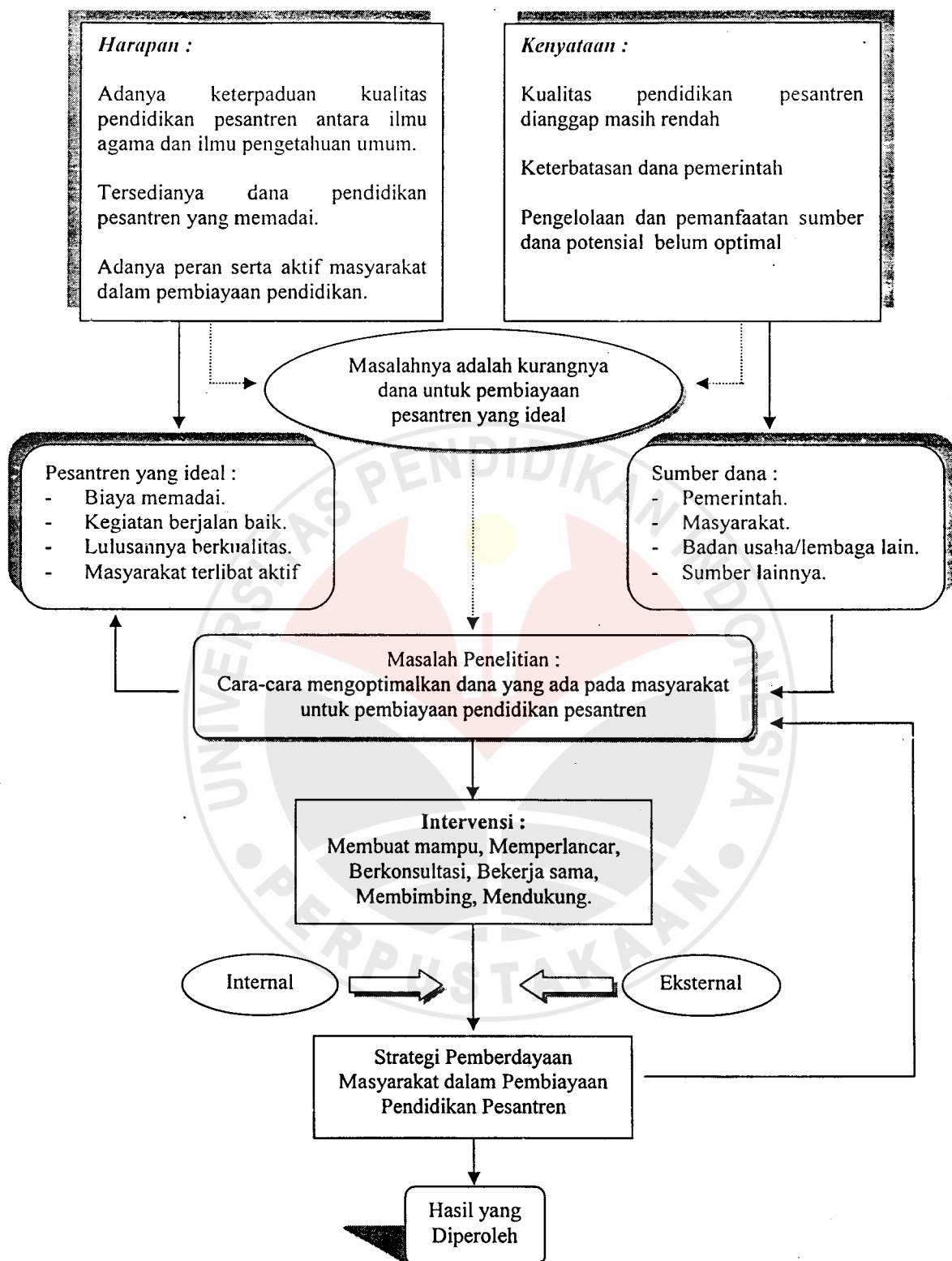
Pengertian paradigma dalam penelitian ini dipahami sebagai kerangka berpikir konseptual yang digunakan untuk menghadapi objek penelitian, yang merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan and Biklen (1992 : 33) bahwa:

Paradigm is a loose collection of logically health together assumption, concepts or propotions the orient thinking or research.

Menurut Nasution (1988 : 2). ia menyatakan : *paradigma ialah suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu pandangan tentang dunia sekitar.* Sedang Lexy J. Moleong (1995 :30) menyatakan bahwa : *paradigma usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filosof, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma.* Paradigma dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai kerangka pemikiran yang didasarkan pada posisi masalah untuk mengarahkan penelitian. Paradigma penelitian ini diilustrasikan dalam gambar 1.1

Gambar tersebut memberikan penjelasan, yakni adanya sejumlah harapan yang diinginkan terhadap pendidikan pesantren berkualitas, dengan dukungan dana pendidikan yang memadai. Namun dalam kenyataannya terdapat berbagai kendala untuk mewujudkan hal tersebut, terutama keterbatasan bantuan dana dari pihak pemerintah. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan pesantren harus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan secara lebih optimal.

Yang menjadi masalah mendasar yakni bagaimana pihak lembaga pendidikan pesantren dalam hal ini pesantren DT mengelola peran serta masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan sehingga tujuan dan harapan terhadap pendidikan pesantren tercapai. Hasil temuan ini selanjutnya dibahas dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan tujuan penelitian akhirnya dapat disimpulkan dan diambil suatu rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan pada sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan pesantren.



Gambar 1.1. Paradigma Penelitian

